

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Sesuai Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra PD) yang dituangkan kedalam perencanaan tahunan yang lebih bersifat operasional. Renja PD mengarah kepada program dan kegiatan untuk pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai Implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis.

Dalam penyusunannya, Renja PD mengaju kepada RKPD yang mana RKPD tersebut akan dibahas bersama DPRD untuk penetapan KUA-PPAS. Nota Kesepakatan pimpinan DPRD dengan KDH menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD. RKA-PD dan Nota Kesepakatan tersebut kemudian dibahas bersama tim TAPD yang akan menghasilkan Ranperda APBD sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari enam tahapan utama yaitu:

- a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pada tahap persiapan Inspektorat Daerah Provinsi sebelumnya telah membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor:700-246-2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Penyusunan rancangan awal Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang ditetapkan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, untuk selanjutnya diverifikasi oleh Bappeda.

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah,

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021,
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
22. Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024,
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2000 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
24. Surat Bersama Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025,
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032,
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,

28. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah,
30. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat,
31. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatera Barat Tahun 2021,
32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021
33. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/816/XI/P2EPD/Bappeda-2021 tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023,
34. Keputusan Inspektur Daerah Nomor 700/10/SK-Insp/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026,
35. Keputusan Inspektur Daerah Nomor 700/ /SK-Insp/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi tahun 2023 disusun dengan maksud memberikan arahan, pedoman, dan memadukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan prestasi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengawasan dan sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RKPD Provinsi Tahun 2023. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan SKPD periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 serta menggambarkan capaian kinerja yang ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja Anggaran OPD.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023 adalah:



1. Meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh OPD.
3. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.
4. Memberikan arahan dan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1.4.Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah.

II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Indikator, Lokasi, Kebutuhan dana tahun berjalan dan Prakiraan maju.

V. Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah Pelaksanaan, Rencana Tindak Lanjut.

II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan untuk mencapai pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2016-2021, sebagai penunjang program/kegiatan pengawasan pada tahun 2021 melalui APBD kinerja telah dialokasikan anggaran setelah Anggaran Perubahan sebesar **Rp18.070.297.496,00** dengan rincian sebagai berikut:

Sumber dana	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4	5
o BELANJA OPERASI	18.056.941.496	17.463.844.684	96,72	593.096.812
– Belanja Pegawai	10.555.685.910	10.221.259.355	96,83	334.426.555
– Belanja Barang Jasa	7.501.255.586	7.242.585.329	96,55	258.670.257
Jumlah Belanja Operasi	18.056.941.496	17.463.844.684	96,72	593.096.812
o Belanja Modal	13.356.000	12.350.000	92,47	1.006.000
<i>TOTAL (dengan aplikasi)</i>	17.476.194.684	17.476.194.684	96,71	594.102.812
<i>TOTAL MANUAL</i>		17.479.494.684	96,73	
<i>Selisih (contra post)</i>		15.650.000		

Adapun Realisasi Keuangan termasuk Anggaran Perubahan tahun 2021 sebesar **Rp.17.476.194.684,00** dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian atas realisasi belanja pegawai sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu
1	2	3	4	5
	Belanja Pegawai	10.555.685.910	10.221.259.355	334.426.555
a	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.486.139.320	6.306.146.761	179.992.559
b	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.892.646.590	3.747.842.594	144.803.996

c	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	176.900.000	167.270.000	9.630.000
---	--------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-----------

b. Belanja Barang Jasa

Uraian atas realisasi belanja barang jasa sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu
1	2	3	4	5
	Belanja Barang dan Jasa	7.501.255.586	7.242.585.329	258.670.257
a	Belanja Barang	974.855.806	956.647.742	18.208.064
	o Belanja Barang Pakai Habis	974.855.806	956.647.742	18.208.064
	– Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	226.513.420	226.236.102	277.318
	– Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.140.000	980.000	160.000
	– Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.401.900	62.215.975	185.925
	– Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	90.888.700	90.595.565	293.135
	– Belanja Alat/Bahan untuk	158.157.475	157.062.978	1.094.497
	– Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.602.000	2.600.000	2.000
	– Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	49.984.800	49.715.800	269.000
	– Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.245.600	6.241.550	4.050
	– Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	37.440.000	37.338.000	102.000
	– Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.015.636	13.012.275	3.361
	– Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.298.275	234.483.997	15.814.278
	– Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.168.000	5.165.500	2.500
	– Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	71.000.000	71.000.000	-
b	Belanja Jasa	1.655.745.054	1.640.234.501	15.510.553
	o Belanja Jasa Kantor	1.523.195.054	1.507.733.681	15.461.373
	o Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	48.600.000	48.550.820	49.180
	o Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.500.000	3.500.000	-
	o Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	80.450.000	80.450.000	-
c	Belanja Pemeliharaan	210.215.400	209.782.900	432.500
	o Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	164.515.400	164.283.300	232.100

	Mesin			
	o Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.700.000	45.499.600	200.400
d	Belanja Perjalanan Dinas	4.660.439.326	4.435.920.186	224.519.140
	o Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.660.439.326	4.435.920.186	224.519.140
	– Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.303.094.326	3.161.070.186	142.024.140
	– Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.357.345.000	1.274.850.000	82.495.000

c. Belanja Modal

Uraian atas realisasi belanja Modal sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu
1	2	3	4	5
	BELANJA MODAL	13.356.000	12.350.000	12.350.000
a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.356.000	12.350.000	12.350.000
	o Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.500.000	7.500.000	0
	o Belanja Modal Peralatan Komputer	5.856.000	4.850.000	1.006.000

Berdasarkan anggaran dan realisasi Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan, yaitu Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diaplikasikan kedalam 8 (delapan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Pengawasan yang diaplikasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang diaplikasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

Adapun dukungan dana/anggaran belanja untuk 3 (tujuh) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan sebesar **Rp.18.070.297.496,00** dengan rincian sebagai berikut;

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp13.059.884.501,00, dengan 8 kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, antara lain:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp137.777.550,00, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran sebesar 56.857.500,00
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD anggaran sebesar Rp7.335.550,00
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD anggaran sebesar Rp39.455.200,00

- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp34.129.300,00
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp10.587.117.710,00 dengan sub kegiatan:
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran sebesar Rp10.378.785.910,00
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN anggaran sebesar Rp179.536.000,00
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD anggaran sebesar Rp2.269.500,00
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran sebesar Rp11.212.800,00
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Lapkeu Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD anggaran sebesar Rp15.313.500,00
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp50.234.600,00 dengan sub kegiatan:
- a. Pengamanan BMD SKPD anggaran sebesar Rp41.600.000,00
 - b. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp8.634.600,00
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp232.370.500,00 dengan sub kegiatan:
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya anggaran sebesar Rp71.000.000,00
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran sebesar Rp112.490.500,00
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan anggaran sebesar Rp6.425.000,00
 - d. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan anggaran sebesar Rp42.455.000,00
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 788.567.801 dengan sub kegiatan:
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran sebesar Rp6.101.600,00
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran sebesar Rp131.947.501,00

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran sebesar Rp63.646.000,00
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan anggaran sebesar Rp29.640.000,00
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp557.232.700,00
- 6) Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda anggaran sebesar 13.356.000,00 dengan sub kegiatan:
- a. Pengadaan Mebel anggaran sebesar Rp7.500.000,00
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran sebesar Rp5.856.000,00
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda anggaran sebesar Rp1.013.734.940,00 dengan sub kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran sebesar Rp23.785.800,00
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran sebesar Rp362.436.000,00
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran sebesar 3.696.950,00
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran sebesar Rp623.816.190,00
- 8) Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda anggaran sebesar Rp236.725.400,00 dengan sub kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran sebesar Rp31.690.000,00
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran sebesar Rp89.110.400,00
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran sebesar Rp61.975.000,00
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran sebesar Rp53.950.000,00

- b) Program Penyelenggaraan Pengawasan anggaran sebesar Rp4.189.151.260,00, dengan 2 (dua) kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan, antara lain:
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal anggaran sebesar Rp4.081.811.460,00 dengan sub kegiatan:
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp2.323.907.985,00
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp619.649.869,00
 - c. Reviu Laporan Kinerja anggaran sebesar Rp80.759.250,00
 - d. Reviu Laporan Keuangan anggaran sebesar Rp110.911.000,00
 - e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp397.989.356,00
 - f. Kerja sama Pengawasan Internal anggaran sebesar Rp9.100.000,00
 - g. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP anggaran sebesar Rp539.494.000,00
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu anggaran sebesar Rp107.339.800,00 dengan sub kegiatan:
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah anggaran sebesar Rp12.807.250,00
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu anggaran sebesar Rp94.532.550,00
- c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi anggaran sebesar Rp821.261.735,00, dengan 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, antara lain:
- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Rp331.780.754,00 dengan sub kegiatan:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan anggaran sebesar Rp314.285.754,00
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan anggaran sebesar Rp17.495.000,00
 - 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi anggaran sebesar Rp489.480.981,00 dengan sub kegiatan:
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp5.763.732,00

- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB anggaran sebesar Rp180.256.325,00
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi anggaran sebesar Rp250.240.550,00
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas anggaran sebesar Rp53.220.374,00

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2021

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:



NO URUT	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	Fisik DPA	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	6 01 01	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	13.059.884.501	12.703.845.728	98,50		
6 01 01 1 01		1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	137.777.550	134.625.225	98,06		
6 01 01 1 01 01		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.857.500	56.173.975	98,80	5	Dokumen 5
6 01 01 1 01 04		b. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	7.335.550	7.314.000	99,71	4	Dokumen 4
6 01 01 1 01 05		c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	39.455.200	37.175.750	94,22	2	Dokumen 2
6 01 01 1 01 07		d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.129.300	33.961.500	99,51	4	Dokumen 4
6 01 01 1 02		2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.587.117.710	10.253.164.005	98,06		
6 01 01 1 02 01		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.378.785.910	10.053.989.355	96,87	99	orang 97
6 01 01 1 02 02		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	179.536.000	170.501.750	94,97	12	bulan 12
6 01 01 1 02 03		c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.269.500	2.253.200	99,28	12	bulan 12
6 01 01 1 02 05		d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.212.800	11.157.000	99,50	1	laporan 1
6 01 01 1 02 07		e. Koordinasi dan Penyusunan Lapkeu Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.313.500	15.262.700	99,67	13	laporan 13
6 01 01 1 03		3. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	50.234.600	50.146.420	99,91		
6 01 01 1 03 02		a. Pengamanan BMD SKPD	41.600.000	41.573.420	99,94	8	unit kendaraan 8
6 01 01 1 03 06		b. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	8.634.600	8.573.000	99,29	2	laporan 2
6 01 01 1 03 06		4. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	232.370.500	231.697.912	98,98		
6 01 01 1 05 02		a. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	71.000.000	71.000.000	100,00	94	stel 95
6 01 01 1 05 09		b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	112.490.500	112.199.600	99,74	19	orang 19
6 01 01 1 05 10		c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	6.425.000	6.203.350	96,55	4	kali 7
6 01 01 1 05 11		d. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	42.455.000	42.294.962	99,62	150	orang 119
6 01 01 1 06		5. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	788.567.801	785.192.660	98,97		
6 01 01 1 08 01		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.101.600	6.097.550	99,93	12	bulan 12
6 01 01 1 08 02		b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.947.501	131.859.235	99,93	12	bulan 12
6 01 01 1 08 03		c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.646.000	63.631.885	99,98	12	bulan 12
6 01 01 1 08 04		d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.640.000	28.260.000	95,34	12	bulan 12
6 01 01 1 06 09		e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	557.232.700	555.343.990	99,66	12	bulan 12
6 01 01 1 07		6. PENGADAAN BMD URUSAN PEMDA	13.356.000	12.350.000	91,41		
6 01 01 1 07 05		a. Pengadaan Mebel	7.500.000	7.500.000	100,00	3	unit 3
6 01 01 1 07 06		a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.856.000	4.850.000	82,82	1	unit 1
6 01 01 1 08		7. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMDA	1.013.734.940	1.008.345.956	98,39		
6 01 01 1 08 01		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.785.800	23.760.250	99,89	12	bulan 12
6 01 01 1 08 02		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	362.436.000	358.659.078	98,96	2 3600 100 150000	rekening kubik mbps kwh 15000
6 01 01 1 08 03		c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.696.950	3.509.000	94,92	12	bulan 12
6 01 01 1 08 04		d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	623.816.190	622.417.628	99,78	12	bulan 12
6 01 01 1 09		8. PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMDA	236.725.400	228.323.550	97,45		
6 01 01 1 09 01		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.690.000	31.439.775	99,21	12	bulan 12
6 01 01 1 09 02		b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.110.400	81.345.675	91,29	12	bulan 12
6 01 01 1 09 06		c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.975.000	61.811.100	99,74	12	bulan 12
6 01 01 1 09 10		d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.950.000	53.727.000	99,59	12	bulan 12
2	6 01 02	II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.189.151.260	3.987.596.391	98,17		
6 01 02 1 01		1. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	4.081.811.460	3.880.753.016	96,61		
6 01 02 1 01 01		a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.323.907.985	2.223.433.671	95,88	103 2 3 151	LHE Lap.Mon LHP LHR
6 01 02 1 01 02		b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	619.649.869	552.982.285	89,24	224	LHR 248
6 01 02 1 01 03		c. Reviu Laporan Kinerja	80.759.250	80.099.000	99,18	8	Laporan 50
6 01 02 1 01 04		d. Reviu Laporan Keuangan	110.911.000	110.851.550	99,95	51	Laporan 51
6 01 02 1 01 05		e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	397.989.356	396.217.450	99,55	40	LHP 24
6 01 02 1 01 06		f. Kerjasama Pengawasan Internal	9.100.000	8.960.000	98,46	19	LHE 19
6 01 02 1 01 07		g. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	539.494.000	508.209.060	94,20	70	% 78
6 01 02 1 02		2. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	107.339.800	106.843.375	99,74		
6 01 02 1 02 01		a. Penganganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.807.250	12.807.250	100,00	1	laporan 1
6 01 02 1 02 02		b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	94.532.550	94.036.125	99,47	100	% 100
3	6 01 03	III. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	821.261.735	788.052.565	96,86		
6 01 03 1 01		1. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASANDAN FASILITASI PENGAWASAN	331.780.754	317.279.290	97,57		
6 01 03 1 01 01		a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	314.285.754	299.828.290	95,40	1	PKPT 2
6 01 03 1 01 02		b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	17.495.000	17.451.000	99,75	1	Peraturan 0
6 01 03 1 02		2. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	489.480.981	470.773.275	96,15		
6 01 03 1 02 01		a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	5.763.732	5.316.500	92,24	1	Laporan 1
6 01 03 1 02 02		b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	180.256.325	180.000.550	99,86	1	laporan 1
6 01 03 1 02 03		c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	250.240.550		92,89	3	laporan 3
6 01 03 1 02 04		d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53.220.374	53.005.825	99,60	3	laporan 2
		Jumlah	18.070.297.496	17.479.494.684	96,73		

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, anggaran Rp13.059.884.501,00 realisasi Rp12.703.845.728,00 atau capaian 98.50% dari anggaran, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sbb.:

No.	Kegiatan dan sub kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.777.550	134.625.225	98,06
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.857.500	56.173.975	98,80
	b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.335.550	7.314.000	99,71
	c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	39.455.200	37.175.750	94,22
	d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.129.300	33.961.500	99,51
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.587.117.710	10.253.164.005	98,06
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.378.785.910	10.053.989.355	96,87
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	179.536.000	170.501.750	94,97
	c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.269.500	2.253.200	99,28
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.212.800	11.157.000	99,50
	e. Koordinasi dan Penyusunan Lapkeu Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.313.500	15.262.700	99,67
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	50.234.600	50.146.420	99,61
	a. Pengamanan BMD SKPD	41.600.000	41.573.420	99,94
	b. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	8.634.600	8.573.000	99,29
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.370.500	231.697.912	98,98
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71.000.000	71.000.000	100,00
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	112.490.500	112.199.600	99,74
	c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	6.425.000	6.203.350	96,55
	d. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	42.455.000	42.294.962	99,62
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	788.567.801	785.192.660	98,97
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.101.600	6.097.550	99,93
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.947.501	131.859.235	99,93
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.646.000	63.631.885	99,98
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.640.000	28.260.000	95,34
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	557.232.700	555.343.990	99,66
6	Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda	13.356.000	12.350.000	91,41
	a. Pengadaan Mebel	7.500.000	7.500.000	100,00
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.856.000	4.850.000	82,82
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	1.013.734.940	1.008.345.956	98,39
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.785.800	23.760.250	99,89
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	362.436.000	358.659.078	98,96
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.696.950	3.509.000	94,92
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	623.816.190	622.417.628	99,78
8	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	236.725.400	228.323.550	97,45

	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.690.000	31.439.775	99,21
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.110.400	81.345.675	91,29
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.975.000	61.811.100	99,74
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.950.000	53.727.000	99,59

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran Rp137.777.550,00 dan realisasi Rp134.625.225,00 atau 98,06% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	Dokumen	56.857.500,00	56.173.975	98,80
b	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	4	Dokumen	7.335.550	7.314.000	99,71
c	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	2	Dokumen	39.455.200	37.175.750	94,22
d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	Dokumen	34.129.300	33.961.500	99,51

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran Rp56.857.500,00 realisasi keuangan Rp56.173.975,00 atau capaian 98,80% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan sebanyak 5 Dokumen yaitu RKT, PK, PK Perubahan, Renstra dan Renja, terealisasi sebanyak 5 Dokumen, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, anggaran Rp7.335.550,00 realisasi keuangan Rp7.314.000,00 atau capaian 99,71% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah terbitnya Dokumen Penyusunan DPA-SKPD sebanyak 4 Dokumen yaitu RKA, RKA Pergeseran, DPA Pergeseran, DPA SKPD, terealisasi sebanyak 4 Dokumen, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, anggaran Rp39.455.200,00 realisasi keuangan Rp37.175.750,00 atau capaian 94,22% dari anggaran, Target dari sub kegiatan adalah terbitnya Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 Dokumen yaitu RKA Perubahan, DPPA SKPD, terealisasi sebanyak 2 Dokumen, pencapaian kinerja sesuai dengan target.
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran Rp34.129.300,00 realisasi keuangan Rp33.961.500,00 atau capaian 99,51% dari anggaran. Target dari sub kegiatan adalah terbitnya Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 Dokumen yaitu LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Laporan Tahunan, terealisasi sebanyak 4 Dokumen, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran Rp10.587.117.710,00 realisasi keuangan Rp10.253.164.005,00 atau capaian 96,87% dari anggaran, , dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99	97	orang	10.378.785.910	10.053.989.355	96,87
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	bulan	179.536.000	170.501.750	94,97
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	bulan	2.269.500	2.253.200	99,28
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	laporan	11.212.800	11.157.000	99,50
e	Koordinasi dan Penyusunan Lapkeu Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	13	13	laporan	15.313.500	15.262.700	99,67

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terdiri atas 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran Rp179.536.000,00 realisasi keuangan Rp10.053.989.355,00 atau capaian 96,87% dari anggaran, Target dari sub kegiatan adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat yang dalam 1 tahun selama 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN

Inspektorat sebanyak 97 orang dari anggaran sebanyak 99 orang, 1 orang mutasi pada bulan Mei 2021 ke BPSDM Provinsi Sumatera Barat dan 1 orang mutasi pada bulan Desember 2021 ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, namun pembebanan gaji tetap pada Inspektorat, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, anggaran Rp179.536.000,00 realisasi keuangan Rp170.501.750,00 atau capaian 94,97% dari anggaran, Target dari sub kegiatan adalah tersedianya Jasa administrasi Keuangan (pengelola keuangan, pengelola barang milik daerah, pengelola sistem informasi, petugas PPHPK selama 12 bulan, terealisasi sebanyak 11 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran honorarium bendahara pengeluaran, honor PPTK 3 orang, honor PPK 1 orang, PA 1 orang dan KPA 1 orang, honor Pejabat Pembuat Komitmen 1 orang, dan honor pengurus barang 3 orang, pencapaian kinerja sesuai dengan target.
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, anggaran Rp2.269.500,00 realisasi keuangan Rp2.253.200,00 atau capaian 99,28% dari anggaran. Target dari sub kegiatan adalah Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan selama 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan, pencapaian kinerja sesuai dengan target.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran Rp11.212.800,00 realisasi keuangan Rp11.157.000,00 atau capaian 99,50% dari anggaran. Target dari sub kegiatan adalah telah disusunnya laporan keuangan Inspektorat sebanyak 1 laporan, terealisasi sebanyak 1 laporan keuangan, pencapaian kinerja sesuai dengan target.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Lapkeu Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, anggaran Rp15.313.500,00 realisasi keuangan Rp15.262.700,00 atau capaian 99,67% dari anggaran. Target dari sub kegiatan adalah tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran dengan target 13 laporan, terealisasi sebanyak 13 laporan. Anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan laporan keuangan bulanan dari bulan Januari s.d. Desember 2021 sebanyak 12 laporan, dan penyusunan laporan semester 1 tahun 2021, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, anggaran Rp50.234.600,00 realisasi keuangan Rp50.146.420,00 atau capaian 99,61% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Pengamanan BMD SKPD	8	8	Unit kendaraan	41.600.000	41.573.420	99,94
b	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	2	2	laporan	8.634.600	8.573.000	99,29

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Pengamanan BMD SKPD, anggaran Rp41.600.000,00 realisasi keuangan Rp41.573.420,00 atau capaian 99,94% dari anggaran,
Target dari sub kegiatan adalah Barang Milik Daerah diasuransikan berupa 8 unit kendaraan selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 8 kendaraan dinas. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4 (empat) empat yaitu 5 unit untuk kendaraan operasional pemeriksa, 3 unit kendaraan dinas sekretariat dan kendaraan pimpinan, pencapaian kinerja sesuai dengan target.
- b. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah, anggaran Rp8.634.600,00, realisasi keuangan Rp8.573.000,00 atau capaian 99,29% dari anggaran.
Target dari sub kegiatan adalah tersusunnya laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebanyak 2 laporan, terealisasi sebanyak 2 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan laporan semesteran dan laporan akhir tahun Penatausahaan Barang Milik Daerah, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah anggaran Rp232.370.500,00 realisasi keuangan Rp231.697.912,00 atau capaian 98,98% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja	Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan
-----	--------------	--------------------	-----------------	--------------------

		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	94	95	Stel	71.000.000	71.000.000	100,00
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19	19	orang	112.490.500	112.199.600	99,74
c	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4	7	kali	6.425.000	6.203.350	96,55
d	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	150	119	orang	42.455.000	42.294.962	99,62

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, anggaran Rp71.000.000,00, realisasi keuangan Rp71.000.000,00 atau capaian 100,00 dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan sebanyak 94 stel, terealisasi sebanyak 95 stel. Anggaran tersebut digunakan untuk Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN/NON ASN. Penambahan anggaran 1 stel adalah pada Anggaran Perubahan yaitu ada pegawai pindah ke Inspektorat, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran Rp112.490.500,00 realisasi keuangan Rp112.199.600,00 atau capaian 99,74% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah APIP dapat mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal dengan target 19 orang, terealisasi sebanyak 19 orang, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, anggaran Rp6.425.000,00 realisasi keuangan Rp6.203.350,00 atau capaian 96,55% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan target sebanyak 4x, terealisasi sebanyak 7x. pencapaian kinerja melebihi target yang ditetapkan.

- d. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan, anggaran Rp42.455.000,00, realisasi keuangan Rp42.294.962,00 atau capaian 99,62% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah APIP yang dapat mengikuti Bimtek sebanyak 150 orang, terealisasi sebanyak 119 orang. Anggaran tersebut digunakan untuk pengiriman AIP mengikuti Bimtek, pencapaian kinerja di bawah target.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan kuantitas sumber daya pengawas yang profesional, yang akan diwujudkan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah peningkatan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa.

Selama tahun 2021, kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia telah dilakukan melalui berbagai macam Diklat dan sebagainya antara lain:

No.	Jenis Diklat	Jumlah
1	Diklat Fungsional	19
	a. Diklat Penjenjangan Madya	2
	b. Diklat Penjenjangan Muda	3
	c. Diklat Penjenjangan Ahli	4
	d. Diklat Penjenjangan Terampil	4
	e. Diklat Pembentukan PPUPD	6
2	Diklat Teknis	7
	a. Diklat Audit Investigatif	1
	b. Diklat Audit PAD	1
	c. Diklat Profit Pengadaan Barang dan Jasa	2
	d. Diklat Tematik APIP Daerah tahun 2021	1
	e. Diklat Audit Kinerja	2
3	Diklat/Penataran Lainnya	119
	a. Bimtek Aplikasi OMSPAN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2021	7
	b. Bimtek Audit sistem administrasi kepegawaian daerah, analisis manajemen SDM, Penyusunan SKP dan Penerapan Disiplin PNS	2
	c. Pelatihan kegiatan Peningkatan Kapasitas Stakeholders Clearing House dan Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan	2
	d. Workshop dalam kegiatan Webinar Managing Fraud Risk During the Crisis	6
	e. Bimtek pembinaan peran serta masyarakat provinsi Sumatera Barat Bersama Bidang Pendidikan dan peran serta masyarakat KPK-RI	2
	f. Sosialisasi Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	2
	g. PKS tentang Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021	60

	tentang Perubahan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	
	g. Sosialisasi tentang SIBIJAK (Sistem Informasi Jabatan Berkualitas)	38
	Total	145

5. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah anggaran Rp788.567.801,00 realisasi keuangan Rp785.192.660,00 atau capaian 98,97% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	bulan	6.101.600	6.097.550	99,93
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	bulan	131.947.501	131.859.235	99,93
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	bulan	63.646.000	63.631.885	99,98
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	bulan	29.640.000	28.260.000	95,34
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	bulan	557.232.700	555.343.990	99,66

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran Rp6.101.600,00 realisasi keuangan Rp6.097.550,00 atau capaian 99,93% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor habis pakai selama 12 bulan, terealisasi

selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian peralatan listrik yang dibutuhkan selama 12 bulan, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran Rp131.947.501,00 realisasi keuangan Rp131.859.235,00 atau capaian 99,93% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya alat/bahan tulis kantor selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian alat/bahan tulis kantor, bahan komputer dan penyediaan makan minum rapat 20 orang x 3hari x 10kali, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran Rp63.646.000,00 realisasi keuangan Rp63.631.885,00 atau capaian 99,98,00 dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pencetakan amplop, cetak blangko SPPD, cetak kuitansi, cetak map dan penggandaan dokumen, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Rp29.640.000,00 realisasi keuangan Rp28.260.000,00 atau capaian 95,34% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran langganan koran dan majalah, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran Rp557.232.700,00 realisasi keuangan Rp555.343.990,00 atau capaian 98,97% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk koordinasi ke BKN dalam rangka kenaikan pangkat dan pengurusan pensiun, kunjungan kerja Bersama DPRD Provinsi, pengambilan data dan informasi ke Kabupaten/Kota, memenuhi undangan&falityasi/koordinasi dinas/instansi terkait ke kab/kota, pelayanan tamu, fasilitasi pengisian data ICQ ke kantor penghubung, monitoring/forum komunikasi jabfung Auditor ke Kab/Kota, konsultasi dan koordinasi ke Kementerian terkait, Forkom JFA di luar Provinsi dan Konsultasi dengan BPKP

Pusat, dan penyampaian LHP dan fasilitasi TLHP ke Kab/Kota, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

6. Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda

Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda anggaran Rp13.356.000,00 realisasi keuangan Rp12.350.000,00 atau capaian 91,41% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Pengadaan Mebel	3	3	unit	7.500.000	7.500.000	100,00
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	1	unit	5.856.000	4.850.000	82,82

Kegiatan Pengadaan BMD Urusan Pemda terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Pengadaan Mebel, anggaran Rp7.500.000,00 realisasi keuangan Rp7.500.000,00 atau capaian 100,00% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah pengadaan filling kabinet sebanyak 3 unit, terealisasi sebanyak 3 unit. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan filling kabinet sebanyak 2 unit, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran Rp5.856.000,00 realisasi keuangan Rp4.850.000,00 atau capaian 82,82% dari anggaran,

Target dari sub kegiatan adalah pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 1 unit, terealisasi sebanyak 1 unit. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian 1 unit printer, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda anggaran Rp1.013.734.940,00, realisasi keuangan Rp1.008.345.956,00 atau 98,39% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	bulan	23.785.800	23.760.250	99,89
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 3600 100 150000	2 3600 100 15000	rekening kubik mbps kwh	362.436.000	358.659.078	98,96
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan	12	12	bulan	3.696.950	3.509.000	94,92

	Perlengkapan Kantor						
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	bulan	623.816.190	622.417.628	99,78

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda, terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran Rp23.785.800,00 realisasi keuangan Rp23.760.250,00 atau capaian 99,89 dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya pelaksanaan surat menyurat selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian prangko dan meterai, serta biaya pengiriman paket, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, anggaran Rp362.436.000,00 realisasi keuangan Rp358.659.078,00 atau capaian 98,96% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah pembayaran tagihan telepon, air, internet dan listrik selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan pembayaran tagihan telepon sebanyak 2 rekening, tagihan air minum 3600 kubik, tagihan internet dan tagihan listrik sebanyak 150.000 kwh, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran Rp3.696.950,00 realisasi keuangan Rp3.509.000,00 atau capaian 94,92% dari anggaran,

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pengisian tabung pemadam kebakaran, pembelian spanduk, pembelian baterai dan printer, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran Rp623.816.190,00 realisasi keuangan Rp622.417.628,00 atau capaian 99,78% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran honor panitia pengadaan, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

8. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda

Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda anggaran Rp236.725.400,00 realisasi keuangan Rp228.323.550,00 atau capaian 97,45% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	12	bulan	31.690.000	31.439.775	99,21
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	bulan	89.110.400	81.345.675	91,29
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	bulan	61.975.000	61.811.100	99,74
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	12	bulan	53.950.000	53.727.000	99,59

Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda, terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, anggaran Rp31.690.000,00 realisasi keuangan Rp31.439.775,00 atau capaian 99,21% dari anggaran.
Target dari sub kegiatan adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran honor panitia pengadaan, pencapaian kinerja sesuai dengan target.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran Rp89.110.400,00 realisasi keuangan Rp81.345.675,00 atau capaian 91,29% dari anggaran.
Target dari sub kegiatan adalah tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas selama 12 bulan, terealisasi

selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas Inspektur 1 unit, kinerja sesuai dengan target.

- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran Rp61.975.000,00 realisasi keuangan Rp 61.811.100,00 atau capaian 99,74% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan mesin selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan BBM kendaraan dinas operasional, pembayaran pajak roda empat 9 unit dan roda dua 2 unit, pemeliharaan kendaraan dinas roda empat 2 unit dan roda dua 2 unit, pemeliharaan mesin penghancur kertas 1 unit pembelian mesin genset kecil sebanyak 1 unit, pemeliharaan komputer sebanyak 39 unit, pemeliharaan printer sebanyak 23 unit dan pemeliharaan server, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, anggaran Rp53.950.000,00 realisasi keuangan Rp53.727.000,00 atau capaian 99,59% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran asuransi Gedung kantor 1 lantai, pemeliharaan jaringan telepon, dan pemeliharaan Gedung/bangunan kantor, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

b) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan, anggaran Rp4.189.151.260,00 realisasi keuangan Rp3.987.596.391,00 atau 98,17%, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sbb.:

No.	Kegiatan/sub kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.081.811.460	3.880.753.016	96,61
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.323.907.985	2.223.433.671	95,68
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	619.649.869	552.982.285	89,24
c	Reviu Laporan Kinerja	80.759.250	80.099.000	99,18
d	Reviu Laporan Keuangan	110.911.000	110.851.550	99,95
e	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	397.989.356	396.217.450	99,55
f	Kerja sama Pengawasan Internal	9.100.000	8.960.000	98,46
g	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	539.494.000	508.209.060	94,20
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	107.339.800	106.843.375	99,74

	Dengan Tujuan Tertentu			
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.807.250	12.807.250	100,00
b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	94.036.125	94.036.125	99,47

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta mengalokasikan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Inspektorat kemudian Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tiap tahun. Untuk tahun 2021, PKPT Perubahan 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah direncanakan 93 Objek Pemeriksaan (OP) yang terdiri dari 27 OP Provinsi, 24 OP SMA/SMK di Kabupaten/Kota, Reviu 18 kali, Monitoring 1 kali, Evaluasi 4 kali, Monev. Dana Desa 1 kali, Monev. SPM Kab/Kota (sumber dana Dekonsentrasi) 2 Kab./ Kota. Dari 93 OP telah selesai diperiksa seluruhnya dengan tingkat capaian 100%.

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri atas:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, anggaran Rp4.081.811.460,00 realisasi keuangan Rp3.880.753.016,00 atau capaian 96,61% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	103 2 3 151	103 2 43 151	LHE Lap.Mon LHP LHR	2.323.907.985	2.223.433.671	95,68
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	224	248	LHR	619.649.869	552.982.285	89,24
c	Reviu Laporan Kinerja	8	50	Laporan	80.759.250	80.099.000	99,18
d	Reviu Laporan Keuangan	51	51	Laporan	110.911.000	110.851.550	99,95
e	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	40	24	LHP	397.989.356	396.217.450	99,55

f	Kerja sama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi TLHP	19	19	LHE	9.100.000	8.960.000	98,46
g	BPK RI dan TLHP APIP	70	78	%	539.494.000	508.209.060	94,20

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, anggaran Rp4.081.811.460,00 realisasi keuangan Rp3.880.753.016,00 atau capaian 96,61% dari anggaran, terdiri atas 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, anggaran Rp2.323.907.985,00 realisasi keuangan Rp2.223.433.671,00 atau capaian 95,68% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah pelaksanaan evaluasi sebanyak 103 objek, monitoring 2 objek, pemeriksaan 3 objek, dan reviu 151 objek selama 1 tahun.

Anggaran tersebut digunakan dengan realisasi sebagai berikut:

No.	Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1	Evaluasi	103	103	50 SAKIP 50 Risk Register 1 Monev Dana Desa 2 Evaluasi Pelayanan Publik
2	Monitoring	2	2	2 Pencapaian PHO FHO dan Monitoring PBJ
3	Pemeriksaan	3	36	BOS
4	Reviu	151	151	50 Renja 50 Renja Perubahan 50 PPRG 1 Vaksin

Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, anggaran Rp619.649.869,00 realisasi keuangan Rp552.982.285,00 atau capaian 89,24% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya reviu atas kegiatan pada OPD dengan terbitnya sebanyak 224 LHR selama 12 bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk:

No.	Jenis Pemeriksaan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Monitoring Tutup Buku		51	OPD
2	Probit Audit		5	Permintaan
3	DAK		39	13 Sub Kegiatan @3tahap
4	Reviu RKA		51	OPD
5	Reviu RKA Perubahan		51	OPD
6	Reviu KUA PPAS		51	OPD

Total	224	248
-------	-----	-----

Pencapaian kinerja melebihi target, disebabkan adanya restrukturisasi OPD pada Provinsi Sumatera Barat dari semula 50 OPD menjadi 51 OPD pada tahun 2021.

- c. Reviu Laporan Kinerja, anggaran Rp80.759.250,00 realisasi keuangan Rp80.099.000,00 atau capaian 99,18% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya pengawasan kinerja pada OPD dengan terbitnya 8 LHR selama 12 bulan, terealisasi 50 LHR selama 12 bulan.

Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan Reviu LPPD sebanyak 50 OPD. pencapaian kinerja melebihi target. Target pada DPA sebanyak 8 Laporan, seharusnya adalah 50 OPD sesuai dengan jumlah OPD pada Provinsi Sumatera Barata.

- d. Reviu Laporan Keuangan, anggaran Rp110.911.000,00, realisasi keuangan Rp110.851.550,00 atau capaian 99,95% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya pengawasan atas laporan keuangan OPD dan Pemda dengan terbitnya 51 LHR selama 12 bulan, terealisasi dengan terbitnya 51 LHR. Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan reviu Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 50 SKPD dan 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat. Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, anggaran Rp397.989.356,00 realisasi keuangan Rp396.217.450,00 atau capaian 99,55% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota dengan terbitnya 40 LHP selama 12 bulan, terealisasi sebanyak 24 Laporan selama 12 bulan.

Anggaran tersebut digunakan untuk monitoring dana BOS pada 7 Kab/Kota dengan 24 SMA/SMK.

Pencapaian kinerja tidak sesuai dengan target, karena kurangnya anggaran yang tersedia untuk melakukan monitoring ke SMA/SMK pada Kab. dan Kota sehingga target tidak tercapai.

- f. Kerja sama Pengawasan Internal, anggaran Rp9.100.000,00 realisasi keuangan Rp8.960.000,00 atau capaian 98,46% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya pengawasan internal dengan terbitnya 19 LHE selama 12 bulan, terealisasi 19 LHE.

Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota (EPPD) pada Kab./Kota se-Sumatera Barat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah sesuai maksud pasal 9 PP Nomor 3 Tahun 2007 dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD yang disampaikan dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota dan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hasil Evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Adapun tujuan dilakukannya kegiatan EPPD adalah :

- a) Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan.
- b) Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD.
- c) Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota ditingkat provinsi dan nasional.
- d) Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- e) Sebagai bahan masukan bagi Kementerian untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- g. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP, anggaran Rp539.494.000,00 realisasi keuangan Rp508.209.060,00 atau capaian 94,20% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah persentase LHP yang ditindaklanjuti sebanyak 70% selama 12 bulan, terealisasi 78% dari target.

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP)

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pengawasan dapat dilihat dari sejauh mana temuan-temuan hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti/diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas dalam kurun waktu tertentu.

Anggaran tersebut digunakan untuk menindaklanjuti temuan yang belum selesai. Secara kuantitatif dari hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Daerah Provinsi selama tahun 2021 dijumpai sebanyak jumlah temuan 648 dan 1.536 saran dan berupa temuan kerugian negara/daerah serta kewajiban penyetoran kepada negara/daerah senilai Rp447.271.330,00.

Berdasarkan temuan tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.273 saran (82,88%) dengan nilai Rp271.499.989,00 sedangkan sisanya sebanyak 263 saran (17,12%) dengan nilai Rp171.771.341,00 masih dalam penanganan tidak lanjut, karena ada sebagian objek pemeriksaan belum punya cukup waktu untuk menindak lanjuti disebabkan laporan hasil pemeriksaannya diterima pada akhir tahun.

Tahun 2021 telah diprogramkan kegiatan untuk penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik monitoring dan pembahasan TLHP Inspektorat Daerah Provinsi maupun Pemantauan TLHP Itjen Kementerian serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Upaya menagih dan mendorong objek yang diperiksa dan pihak berwenang dalam menyelesaikan TLHP terus dilakukan dan dimaksimalkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar, tidak saja atas hasil pemeriksaan sendiri lainnya tetapi juga atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan lainnya termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Itjen Kementerian dan Unit Pengawas lainnya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2021 adalah;

- a. Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- b. Rapat Koordinasi Pengawasan Pembahasan Tindak Lanjut
- c. Rapat Pemutakhiran Data
- d. Rapat Pra Pembahasan TLHP Badan Pemeriksa Keuangan

Frekuensi kegiatan tersebut selama tahun 2021 untuk tiap aparat pengawasan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	Jumlah
1.	Monitoring/pemantauan TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi, BPK, Itjen Kemendagri, dan Itjen Teknis Lainnya	24 kali
2.	Rapat Pra Pemutakhiran Data Itjen Kemendagri	1 Kali
3.	Rapat Pemutakhiran Data Itjen Kemendagri	1 kali

Pencapaian kinerja melebihi sebesar 8% dari target.

2. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu anggaran Rp107.339.800,00 realisasi keuangan Rp106.843.375,00, atau capaian 99,74% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	1	Laporan	12.807.250	12.807.250	100,00
b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	100	%	94.532.550	94.036.125	99,47

Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, anggaran Rp12.807.250,00 realisasi keuangan Rp12.807.250,00 atau capaian 100,00% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah 1 laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah selama 12 bulan, terealisasi 1 laporan selama 12 bulan.

Anggaran tersebut digunakan untuk Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, anggaran Rp94.532.550,00 realisasi keuangan Rp94.036.125,00 atau capaian 99,47% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah 100% kasus yang masuk telah ditangani selama 12 bulan, terealisasi sebanyak 100% selama 12 bulan.

Anggaran tersebut digunakan untuk menangani adanya pengaduan / pelaporan yang melibatkan pegawai pemerintah atau yang mendapatkan sumber pembiayaan dari anggaran pemerintah yaitu sebanyak 27 kasus dan telah ditindaklanjuti keseluruhannya, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

Adapun pemeriksaan kasus/khusus pengaduan masyarakat meliputi pemeriksaan kasus/khusus berupa pelanggaran Disiplin PNS, PP No. 11 tahun 2017 tentang Pemberhentian PNS, PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2006. Hasil pemeriksaan kasus/khusus/pengaduan masyarakat pada tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat terlihat pada tabel berikut:

No.	Pemeriksaan Kasus/Khusus Dumas	Jumlah
1.	Kasus Izin Perceraian PNS	0
2.	Kasus pelanggaran disiplin PNS	3
3.	Pengaduan Masyarakat	16
4.	Instruksi/Permintaan Pejabat Berwenang	21
5.	Lanjutan dari Pemeriksaan Reguler	1
6.	Whistleblowing System	0

Cat: Pemeriksaan termasuk audit tujuan tertentu pelaksanaan pengawasan vaksinasi

Dari pemeriksaan kasus di atas telah diberikan rekomendasi sebagai berikut:

No.	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat	Jumlah
1	Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990)	
	- Izin perceraian :	
	a. Disetujui	1
	b. Ditolak	-
	c. Damai	-
2	Rekomendasi hukuman disiplin sesuai PP 53/2010, PP 11/2017, PP 10/1983 jo PP 45/1990 sebagai berikut :	

	a. Hukuman Disiplin Berat	2 orang
	b. Hukuman Disiplin Sedang	6 orang
	c. Hukuman Disiplin Ringan	12 orang

c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, anggaran Rp821.261.735,00 realisasi Rp788.052.565,00 atau capaian 96,86% dari anggaran, dengan rincikan kegiatan dan sub kegiatan sbb.:

No.	kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	331.780.754	317.279.290	97,57
	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	314.285.754	299.828.290	95,40
	b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	17.495.000	17.451.000	99,75
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	489.480.981	470.773.275	96,15
	a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	5.763.732	5.316.500	92,24
	b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	180.256.325	180.000.550	99,86
	c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	250.240.550	232.450.400	92,89
	d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53.220.374	53.005.825	99,60

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan rincikan kegiatan sub kegiatan sbb.:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, anggaran Rp331.780.754,00 dan realisasi keuangan Rp317.279.290,00 atau capaian 97,57% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1	2	PKPT	314.285.754	299.828.290	95,40
b	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1	0	Peraturan	17.495.000	17.451.000	99,75

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu:



- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, anggaran Rp314.285.754,00 realisasi keuangan Rp299.828.290,00 atau capaian 95, 40% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah 1 PKPT selama 12 bulan, terealisasi 2 PKPT selama 12 bulan.

Anggaran tersebut digunakan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan berupa penyusunan 2 PKPT yaitu PKPT tahun 2021 dan PKPT Perubahan tahun 2021. PKPT Perubahan tahun 2021 harus dilakukan karena adanya realokasi anggaran.

Pencapaian kinerja melebihi target, dengan melakukan realokasi beberapa belanja untuk mendukung terlaksananya kegiatan.

- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan, anggaran Rp17.495.000,00 realisasi keuangan Rp17.451.000,00 atau capaian 99,75% dari anggaran,

Target dari sub kegiatan adalah tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan sebanyak 1 Peraturan selama 12 bulan, terealisasi 0 selama 12 bulan.

Anggaran tersebut digunakan untuk persiapan penyusunan Peraturan tahun 2021, yaitu telah dilakukan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penyusunan Peraturan ke Kab./ Kota, namun karena adanya realokasi anggaran, Peraturan tidak jadi disusun.

Pencapaian kinerja tidak mencapai target, karena adanya realokasi anggaran.

2. Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi

Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi, anggaran Rp489.480.981,00 realisasi keuangan Rp470.773.275,00 atau 96,15% dari anggaran, dapat diuraikan pada tabel berikut:

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja			Anggaran Rp.	Realisasi Keuangan	
		Target	Realisasi	Satuan		Rp.	%
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	1	1	Laporan	5.763.732	5.316.500	92,24
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	1	1	Laporan	180.256.325	180.000.550	99,86
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	3	Laporan	250.240.550	232.450.400	92,89
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3	2	Laporan	53.220.374	53.005.825	99,60

Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, anggaran Rp5.763.732,00 realisasi keuangan Rp5.316.500,00 atau capaian 92,24% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah dengan diterbitkannya Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang diterbitkan 1 laporan selama 12 bulan, terealisasi 1 laporan.

Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan koordinasi dan pengumpulan data awal EPPD ke Kab. dan Kota sebelum dilaksanakannya EPPD, pencapaian kinerja sesuai dengan target.

- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB, anggaran Rp180.256.325,00 realisasi keuangan Rp180.000.550,00 atau capaian 99,86 dari anggaran,

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB dengan diterbitkannya Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterbitkan sebanyak 1 laporan, terealisasi 1 laporan.

Anggaran tersebut digunakan untuk melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenpan Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meliputi :

1. Memperoleh Akun dan Password dari Kemenpan RB,
2. Membentuk Tim Asesor PMPRB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2021 yang beranggotakan seluruh OPD yaitu sebanyak 51 OPD,
3. Membuat ID Pengguna untuk 51 OPD dengan password untuk masuk ke dalam aplikasi PMPRB masing-masing OPD,
4. Panel evaluasi pelaksanaan RB, pembahasan evaluasi PMPRB 51 OPD sesuai dengan bukti dukung yang dilampirkan,
5. Memverifikasi dokumen/data dukung sesuai dengan lembar kerja evaluasi,
6. Menginput data evaluasi PMPRB pada aplikasi PMPRB yang dilakukan oleh 51 OPD,

7. Memverifikasi data evaluasi PMRPB pada aplikasi yang telah dientry oleh 51 OPD,
8. Inspektorat mengirimkan hasil ke Sekretariat Daerah,
9. Sekretariat Daerah mengirimkan ke Kementerian PANRB.

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berupa entrian data secara elektronik telah dikirim ke Menpan melalui website ***pmprb.menpan.go.id*** secara online.

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah **66,87** atau kategori **"B"**. Indeks Reformasi Birokrasi ini merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
I	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20,00	12,76
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,64
3	Reform	30,00	19,23
Total Komponen Pengungkit		60,00	38,63

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
II	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,31
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,78
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,18
4	Kinerja Organisasi	10,00	3,97
	Total Komponen Hasil	40,00	28,24
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+ Hasil)		100,00	66,87

i

an kinerja sesuai dengan target.

Sedangkan hasil antara, antara lain:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Merit System	0-400	270 (baik)	KASN
2	Profesionalisme ASN	0-100	76 (sedang)	BKN
3	Kualitas Pengelolaan PBJ	0-100	60 (cukup)	LKPP

4	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	75,11 (sangat baik)	ANRI
5	Maturitas SPIP	0-5	3 (terdefinisi)	BPKP
6	Kapabilitas APIP	0-5	3 (terintegrasi)	BPKP

Pencapaian sesuai dengan target.

- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, anggaran Rp250.240.550,00, realisasi keuangan Rp232.450.400,00 atau capaian 92,89% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan diterbitkannya Laporan Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diterbitkan 3 Laporan selama 12 bulan, terealisasi 3 laporan kegiatan.

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan:

- a) Evaluasi SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Aktivitas dari sebuah organisasi pasti akan berubah dan berkembang seiring dengan perubahan di lingkungan internal dan eksternalnya. Salah satu hasil dari perubahan aktivitas tersebut adalah risiko. Risiko akan terjadi apabila ada kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi, misalnya tujuan dan misi dari organisasi tidak akan tercapai. Kegagalan tercapainya tujuan dan misi bagi organisasi publik dapat mengakibatkan distrust (ketidakpercayaan) dari publik atas pelayanan yang diberikan. Kegagalan risiko dapat dihindari dengan melakukan manajemen risiko. Proses manajemen risiko dapat digunakan sebagai dasar penentuan peta risiko, dampak, dan sikap yang harus diambil.

Kerangka manajemen risiko melibatkan beberapa proses, di antaranya adalah:

- (1) manajemen risiko merupakan identifikasi kehati-hatian dan penilaian atas risiko yang akan dihadapi, (2) perumusan model atau strategi untuk menangkal risiko, dan (3) monitoring dan pemeriksaan menyangkut segala

tindakan dan model yang dilakukan. Manajemen risiko dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas yang dimiliki organisasi. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pencapaian tujuan dan menyamakan pemahaman OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait Manajemen Risiko Sektor Pemerintah Daerah maka pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 bertempat di Hotel Axana Kota Padang Inspektorat Provinsi mengadakan Sosialisasi Manajemen Risiko Sektor Pemerintah Daerah dengan mengundang Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan mengikut sertakan sejumlah 61 (enam puluh) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Tim SPIP Provinsi Sumatera Barat dari 10 (sepuluh) OPD wajib dan OPD sampel telah melakukan penginputan Baseline Data ke Template SPIP yang telah disediakan oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat. Tim SPIP Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selanjutnya melakukan kompilasi atas Baseline data tersebut dan kemudian menyerahkan hasil kompilasi kepada Tim BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

b) Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. *(penjelasan Pasal 12B UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).*

Dalam rangka penyelenggaraan ke pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-324-2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Program pengendalian gratifikasi bertujuan mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan

gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2021. Berikut pelaksanaan kegiatan Program Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan oleh UPG selama periode bulan Januari s.d. Desember 2021 melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut.

1) Focus Group Discussion (FGD)

Berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1473/GTF.03.00/13/03/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal FGD Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi, telah dilaksanakan FGD antara UPG dengan Tim KPK pada tanggal 4 Maret 2021 bertempat di Aula Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2) Verifikasi Laporan Gratifikasi

Tahun 2021, kondisi sampai dengan bulan Desember 2021 UPG telah menerima 4 laporan penerimaan/penolakan gratifikasi.

3) Monev Program Pengendalian Gratifikasi

Berdasarkan hasil monev PPG Tahun 2021 yang dilakukan oleh KPK, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 81,75.

c) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 20 Oktober 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

d) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, anggaran Rp53.220.374,00 realisasi keuangan Rp53.005.825,00 atau 99,60% dari anggaran.

Target dari sub kegiatan adalah dilakukannya pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas dengan diterbitkannya Laporan Pendampingan,

Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas sebanyak 3 laporan selama 12 bulan, terealisasi 3 laporan kegiatan.

Anggaran tersebut digunakan dalam 3 bentuk kegiatan yaitu:

a) Pembinaan Zona Integritas

Kegiatan Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

-
- a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun Zona Integritas WBK / WBBM.
 - b. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - c. Menurunkan risiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
-

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan 5 unit kerja untuk di evaluasi sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM. Akan tetapi yang lolos verifikasi awal dari Kemenpan RB hanya 4 unit kerja yaitu : DPMPTSP, RS. Achmad Mochtar Bukittinggi, RS. M. Natsir Solok, dan RS Pariaman. Tahapan evaluasi selanjutnya Kemenpan melakukan *desk* evaluasi di mana Unit kerja terkait menyiapkan paparan dan video terkait pembangunan zona integritas pada masing-masing unit kerja tersebut. BPS juga melakukan survei atas kepuasan pelayanan publik, pada 4 (empat) unit kerja tersebut dan yang lolos survei BPS hanya 2 unit kerja yaitu RS. Achmad Mochtar dan RS. Pariaman. Atas dua unit kerja ini Kemenpan telah melakukan *field* evaluasi langsung ke lapangan.

b) Pelaporan LHKPN dan LHKASN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan. LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK, sementara

LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kemenpan dan RB.

Adapun maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah agar pelaporan harta kekayaan dapat segera dilaporkan oleh seluruh pejabat wajib lapor LHKPN di setiap SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2018 jumlah wajib LHKPN yaitu 491 wajib lapor, Persentase besar 98.98% atau sebanyak 486 orang sudah lapor LHKPN, untuk persentase kepatuhan dengan jumlah wajib LHKPN yang sudah lapor sebesar 79.01% atau sebanyak 384 orang melapor tepat waktu atau sebesar 70.99% dan 102 orang melapor terlambat. SE KPK Nomor SE-08/01.10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pelaksanaan LHKASN pada tahun 2021 meliputi :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan update data wajib lapor LHKASN sebanyak 846 orang wajib lapor
2. Update Data WL sebanyak 846 orang telah disampaikan ke Tim IT Siharka Kemenpan-RB melalui aplikasi WhatShapp (WA) pada tanggal 2 September 2019 untuk dilakukan import data wajib lapor ke aplikasi Siharka
3. Pada awal November 2019, data Wajib LHKASJ baru diipor ke dalam aplikasi Siharka
4. Admin LHKASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang melakukan proses sinkronisasi data wajib LHKASN pada aplikasi Siharka yaitu dengan menonaktifkan non wajib lapor LHKASN yang telah pensiun/tidak menjabat lagi/mutasi/meninggal dunia

Pencapaian kinerja sesuai dengan target.

2.1.2. Perkiraan Capaian Tahun Anggaran 2022

Pada tahun 2022 usulan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi sebesar Rp18.667.473.154,00 terurai dalam 3 program dan 43 kegiatan, diharapkan

keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Adapun program dan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Pagu
INSPEKTORAT DAERAH		20.003.124.912
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.995.838.654
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.426.100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.027.900
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.171.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	37.800.700
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.426.500
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.686.223.876
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.436.481.076
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	196.800.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	10.756.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.212.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.973.500
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.234.600
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	41.600.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.634.600
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	755.281.500
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	376.850.500
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	25.641.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	202.790.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.068.582.053
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.650.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.001.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.944.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.640.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	896.347.053
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000
	Pengadaan Mebel	5.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000


7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.073.090.525
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.675.800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	372.002.400
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	3.696.950
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	672.715.375
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.190.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.400.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.010.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.400.000
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.739.667.508
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.573.425.928
	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	2.168.823.953
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	886.244.869
	Reviu Laporan Kinerja	42.150.500
	Reviu Laporan Keuangan	253.535.100
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	396.981.356
	Kerja sama Pengawasan Internal	60.811.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	764.879.150
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	166.241.580
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	62.791.030
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	103.450.550
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.267.618.750
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	529.881.800
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	47.001.400
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	482.880.400
2	Pendampingan dan Asistensi	737.736.950
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100.271.500
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	122.392.750
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	312.876.700
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	202.196.000

Sumber data: Usulan RKA Inspektorat tahun 2022

2.1.3. Analisis kesesuaian Anggaran tahun 2022 dengan RKPD 2022 dan Renstra 2016-2021

Renstra 2016-2021 Sesuai dengan usulan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi pada tahun 2022 sebesar adalah sebesar Rp20.003.124.912,00, sedangkan pada RKPD tahun 2022 anggaran inspektorat adalah sebesar Rp18.667.473.154,00. Kenaikan anggaran sebesar Rp1.335.651.758,00 tersebut adalah dalam rangka meningkatkan alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dalam rangka menyediakan anggaran yang memadai kepada APIP untuk melakukan pemeriksaan. Peningkatan anggaran ini perlu dilakukan karena meningkatnya objek pemeriksaan mandatori dari Pemerintah Pusat seperti pengawasan vaksin, penanganan covid-19, reviu DAK Fisik dan Non Fisik serta pengawasan dalam pemenuhan MCP KPK RI, dan bentuk pengawasan lainnya. Dalam menunjang anggaran yang memadai untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan tersebut, telah pula di realokasi anggaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program Perumusan Kebijakan dan Program Pendampingan dan Asistensi.

Usulan anggaran Inspektorat Daerah Provinsi pada tahun 2022 sebesar Rp20.003.124.912,00 ini masih dibawah kebutuhan riil Inspektorat Daerah seperti tercermin dalam Renstra 2016-2021 yaitu sebesar Rp33.791.597.000,00 atau masih terdapat kekurangan sebesar Rp15.124.123.846,00. Kekurangan tersebut antara lain seharusnya untuk pembangunan Gedung kantor baru Inspektorat secara bertahap dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 10.475.185.612,00, serta anggaran yang dibutuhkan untuk penyiapan anggaran yang memadai untuk melakukan pemeriksaan, serta anggaran yang dibutuhkan untuk dilakukannya pembinaan dan evaluasi atas PMPRB, ZI, penegakan integritas dan pemenuhan MCP KPK-RI secara maksimal.





Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Provinsi dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut:

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2022
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022 Kondisi Akhir RENSTRA	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan n (Renja PD tahun n-1 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 2021	Realisasi Renja PD Tahun-2 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	PROGRAM IMPLEMENTASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan								
	Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase kasus yang ditangani dan diselesaikan	100	100	100	100	100	100	300	75
	PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN	Meningkatnya fungsi lembaga pengawas dan aparat, penegak hukum dalam pemberantasan								



	HUKUM	korupsi								
	Peningkatan pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dan jumlah obrik yang diperiksa	63	63	63	233	306,98	-	-	-
	Peningkatan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah LHP yang ditindaklanjuti	70	70	75	50	66,67	*	215	53,75
	Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	Terkirimnya peserta untuk mengikuti Bimtek, sosialisasi, dan Diklat teknis lainnya	200	72	200	119	59,5	*	341	85,25
	Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi pengawasan dalam dan luar provinsi	1	1	1	1	100	*	3	0,75
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Terselenggaranya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	19	19	19	100	263	*	4,75	1,1875
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terselenggaranya Penilaian Risiko serta penyusunan SOP secara bertahap Pemprov Sumbar	-	68	-	-	100	*	-	-
	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terselenggaranya evaluasi penilaian mandiri reformasi birokrasi	70	5	70	66,87	100	*	-	-
	Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Terselenggaranya Pembinaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	6	5	6	5	83,33	*	-	-
	Penyusunan Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tersusunnya Perda tata cara penuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	Terselenggaranya sosialisasi dan pengendalian gratifikasi	-	47	-	-	100	*	-	-
	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Terselenggaranya laporan harta kekayaan	1,000	1,000	-	-	-	*	-	-
A	Operasionalisasi Saber Pungli	Terlaksananya pengawasan terhadap pungli	1	-	1	-	-	*	-	-
A1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase ketercapaian penunjang urusan	-	-	-	-	-	100	-	-



	Daerah	pemerintahan daerah provinsi								
A1a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	-	-	-	-	-	80		
A1a	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumah sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	8		
A1a	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	5		
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	75		
B1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	75		
B1B	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Evaluasi yang diterbitkan	-	-	-	-	-	103		
		Laporan Hasil Monitoring yang diterbitkan	-	-	-	-	-	2		
		Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	-	-	-	3		
		Laporan Hasil reviu	-	-	-	-	-	151		
B1b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Hasil Reviu yang diterbitkan (LHR)	-	-	-	-	-	224		
		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	-	-	-	-	-	100		
B1c	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan	-	-	-	-	-	8		
B1d	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan	-	-	-	-	-	51		
B1e	Pengawasan umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah LHP yang diterbitkan	-	-	-	-	-	40		
B1f	Kerja sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal yang diterbitkan	-	-	-	-	-	19		
B1g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase LHP yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	70		
B2	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang	-	-	-	-	-	75		



B2a	dengan Tujuan Tertentu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	ditindaklanjuti Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	-	-	-	-	-	1		
B2b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kasus yang ditangani	-	-	-	-	-	100		
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	-	-	-	-	-	70		
C1a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	-	-	-	-	-	8		
C2	Pendampingan dan Asistensi	"Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	-	-	-	-	-	70		
C2a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan	-	-	-	-	-	1		
C2b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterbitkan	-	-	-	-	-	1		
C2c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	-	-	-	3		
C2d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penegakan integritas	-	-	-	-	-	3		

Keterangan:

-= tidak ada angka target/realisasi

*= satuan/indikator berubah karena adanya perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor_90 Tahun_2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemangunan Dan_Kuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga tidak bisa dianalisis



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah, melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Di samping itu melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah pegawai sebanyak 97 orang, dimana pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk eselon II, III dan IV sebanyak 9 orang, 1 jabatan belum terisi yaitu eselon II (Inspektur) karena Inspektur yang lama sudah pensiun, sampai saat ini masih menunggu adanya pengisian jabatan sesuai dengan kebutuhan jabatan struktural sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk jabatan fungsional pada tahun 2021 baru sebanyak 29 orang Auditor dan 24 orang P2UPD, 1 orang Fungsional Auditor Kepegawaian, dan tenaga aparat pengawas non auditor melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 0 orang. Sedangkan staf sebanyak 34 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	9	-	-	2	7	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	-	-	-	-	-	
	- Eselon III	6	-	-	-	6	
	- Eselon IV	3	-	-	2	1	
2.	Fungsional Auditor	29	-	-	23	6	
	- Ahli Utama	1	-	-	-	1	
	- Ahli madya	5	-	-	-	5	
	- Ahli muda	16	-	-	16	-	
	- Pertama	7	-	-	7	-	
	- Penyelia	-	-	-	-	-	
	- Pelaksana lanjut	-	-	-	-	-	
3.	P2UPD	24	-	-	13	11	
	- Pengawas Pem. Madya	11	-	-	-	11	
	- Pengawas Pem. Muda	6	-	-	6	-	
	- Pengawas Pem. Pertama	7	-	-	7	-	
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	1	-	-	1	-	
5.	Non JFA/P2UPD	-	-	-	-	-	

6.	Staf(Fungsional Umum)	34	-	13	20	1
7.	PTT	-	-	-	-	-
Jumlah		97	-	13	59	25

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

Selain jumlah pegawai, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Nama / Jenis barang	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Kurang baik	Rusak berat
1	2	3	4		
1	Tanah Bangunan Kantor	1 lks	1	-	-
	<u>PERALATAN DAN MESIN</u>				
1	Roda Empat/Mobil	10 unit	8	-	2
2	Sepeda Motor	2 unit	2	-	-
3	Alat ukur	26 unit	26	-	-
4	Rak siku lubang	4 unit	4	-	-
5	Filling Kabinet	12 unit	9	3	-
6	Brand Kas	2 unit	-	2	-
7	White board	3 unit	3	-	-
8	Penghancur kertas	6 unit	5	-	1
9	Finger print	2 unit	-	-	2
10	Lemari arsip	21 unit	13	4	4
11	Lemari arsip eselon 3	4 unit	4	-	-
12	Lemari arsip eselon 2	1 unit	1	-	-
13	Meja Rapat	19 unit	13	6	-
14	Kursi rapat / putar	82 unit	72	10	-
15	Kursi putar siding	16 unit	16	-	-
16	Kursi kerja staf	59 unit	59	-	-
17	Kursi rapat aula	100 unit	100	-	-
18	Meja kerja	27 unit	27	-	-
19	Meja kerja staf	57 unit	57	-	-
20	Meja televisi	1 unit	-	-	1
21	Lemari es	1 unit	1	-	-
22	AC Split	23 unit	23	-	-
23	Televisi	2 unit	2	-	-
24	Speaker Aktif	1 unit	1	-	-
25	Speaker colom (merk toa)	1 unit	1	-	-
26	Micro phone	1 unit	-	1	-
27	Toa Amplifier	1 unit	-	1	-
28	Creas chairmen	1 unit	-	-	1

29	Creas power	1 unit	-	-	1
30	Sound sistem	1 unit	-	-	1
31	Crossover Digital	1 unit	-	-	1
32	Generator set	1 unit	-	1	-
33	UPS/Stabilizer	1 unit	1	-	-
34	Lbg. Burung Garuda	1 unit	1	-	-
35	Gambar Presiden	1 unit	1	-	-
36	Gambar Wk Presiden	1 unit	1	-	-
37	Meja Fodium	1 unit	1	-	-
38	Alat Pemadam	3 unit	3	-	-
39	Personal Computer	15 unit	13	2	-
40	Jaringan SIPKD	1 paket	1	-	-
41	Note Book	47 unit	44	3	-
42	Printer	36 unit	33	3	-
43	Meja kerja eselon III	4 unit	4	-	-
44	Meja kerja pejabat eselon III/IV	4 unit	4	-	-
45	Kursi Hadap	14 unit	14	-	-
46	Kursi Tunggu	1 unit	1	-	-
47	Kursi tamu	4 unit	4	-	-
48	Kursi kerja pejabat eselon II	1 unit	1	-	-
49	Kursi kerja pejabat eselon III/IV	10 unit	10	-	-
50	Kursi tamu pejabat eselon II	1 unit	1	-	-
51	Kursi tamu pejabat eselon III/IV	6 unit	6	-	-
52	Lemari Pustaka/Rak	- unit	-	-	-
53	CCTV	1 paket	1	-	-
54	CCTV (camera CCTV)	1 unit	-	-	1
55	Proyektor	2 unit	2	-	-
56	Sentral PABX 14 Ext. dan 16 ext	1 unit	1	-	-
57	Faximile	1 unit	1	-	-
58	Mesin hitung uang	1 unit	1	-	-
59	Mesin foto copy	1 unit	-	1	-
60	Braket TV, Spliter 4K, Kabel2 HDMI	1 set	1	-	-
	<u>GEDUNG DAN BANGUNAN</u>				
62	Bangunan Kantor	1 lokasi	2	-	-
63	<u>JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN</u>		-	-	-
	<u>ASET TETAP LAINNYA</u>				
64	Buku Peraturan dan Umum	-	-	-	-
65	<u>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</u>	-	-	-	-
	<u>ASET LAINNYA</u>				
66	Aplikasi SIMPATI	1 Paket	1	-	-

Sumber data: Bagian Umum Inspektorat Daerah Provinsi

Kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan Renstra Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 3 (tiga) sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Provinsi dengan Gubernur Sumatera Barat.

Pada Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Pelayanan SKPD dari 3 (tiga) sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	VISI / MISI / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Visi: Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera					
	Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional					
	Tujuan :Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi					
	Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi					
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase OPD yang bebas penyimpangan material dari - Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset 	Nilai Nilai	98 88	100 90	102 102
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda	Nilai	7,9	-	-
3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat	A	A	100

Analisis Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel berikut:

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator	STM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan		Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material	98	-	-	-	100	-	-	-	Renja 2016-2021
			Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Aset	88	-	-	-	90	-	-	-	Renja 2016-2021
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah	7,9	-	-	-	-	-	-	-	Renja 2016-2021
3	Meningkatnya tata kelola organisasi		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (81, 09)	-	-	-	A (81, 09)	-	-	-	Renja 2016-2021
4	Meningkatnya kapabilitas APIP		Tingkat kapabilitas APIP	3	3	3	-	3	3	3	3	Renja 2021-2026
5	Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah		Tingkat Maturitas SPIP	3	3	4	-	3	3	3	4	Renja 2021-2026

Uraian lebih lanjut Indikator/Sasaran Strategis Target Renstra 2016-2021 akan dibahas lebih lanjut, namun tidak termasuk Indikator 4 dan 5 karena merupakan Indikator Renstra 2021-2026.

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan
---------------------	-----------------------------------------

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2016-2021 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pengawasan" dengan 2 buah indikator kinerja:

- a. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dan target kinerja 98%
- b. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset dan target kinerja 88%

Adapun hasil pengukuran capaian sasaran 1 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator 1 dan 2 Kinerja Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material	98	100	102
		Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset	88	90	102

Berdasarkan tabel di atas, analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1, yaitu :

1) Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material dengan target 98%

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2021

Perangkat Daerah dikatakan bebas dari penyimpangan material, apabila penyimpangan nilai keuangan yang terjadi kurang dari atau sama dengan 10% dari total anggaran Perangkat Daerah, dari Pemeriksaan tahun 2021 penyimpangan material tidak ada yang melebihi 10% dari total anggaran masing-masing perangkat daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa Perangkat

Daerah yang bebas dari penyimpangan material ada 51 Perangkat Daerah (100%).

Indikator kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dengan target 98% terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102% termasuk berhasil dengan penilaian sangat baik. Realisasi indikator kinerja OPD yang bebas dari penyimpangan material diukur dengan membandingkan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2020 dengan jumlah seluruh OPD tahun 2021. Perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material adalah sebagai berikut:

Dasar Perhitungan :

- Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material

$$= \frac{\text{Jumlah SKPD yang bebas dari penyimpangan material tahun 2021}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{51 \text{ OPD}}{51 \text{ OPD tahun 2021}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$
- Capaian Kinerja

$$= \frac{100\%}{98\%} \times 100\%$$

$$= 102\%$$

Tabel 2.2
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator 1 Kinerja Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material	98	100	102

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material adalah 100 % dari target 98 % dengan capaian kinerja 102%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 2.3
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
tahun sebelumnya tahun 2019 s/d 2021

INDIKATOR KINERJA	Target			Realisasi (%)			% Capaian		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material	-	96	98	-	100	100	-	104,17	102

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 102% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, dengan adanya peningkatan target indikator kinerja dari tahun sebelumnya (2020) yaitu dari 96 menjadi 98, realisasi pencapaian target tetap dapat dipertahankan sebesar 100%. Realisasi pencapaian tetap dapat dipertahankan sebesar 100%, namun realisasi pencapaian target tahun 2021 sebesar 102% ini masih dibawah realisasi pencapaian target tahun 2020 sebesar 104,17%.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penyimpangan OPD bebas dari penyimpangan material,
- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat,
- Reviu Laporan Keuangan OPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan,
- Membuka kesempatan kepada seluruh OPD untuk konsultasi,

- Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan capaian target OPD yang bebas dari penyimpangan material secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.

2) Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Aset dengan target 88%.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021

SKPD dikatakan bebas dari penyimpangan aset apabila tidak terdapat temuan dengan kode temuan 1.01.06, 1.01.12, 1.02.03, 1.02.04, 1.02.05, 1.02.07 dan 3.03.03. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset dihitung dari perbandingan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan aset tahun 2021 dengan jumlah seluruh OPD tahun 2021.

Dasar Perhitungan :

Persentase OPD yang
bebas dari
penyimpangan aset

$$= \frac{\text{Jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan aset tahun 2020}}{\text{Jumlah seluruh SKPD tahun 2020}} \times 100\%$$

$$= \frac{50 \text{ OPD}}{50 \text{ OPD tahun 2020}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{90}{88} \times 100\%$$

$$= 102\%$$

Capaian Sasaran 1 tahun 2021 dibandingkan target disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja 2 Sasaran 1

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset	88	90	102

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material adalah 90% dari target 88% dengan capaian kinerja 102% (sangat baik).

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian Sasaran 1 tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
tahun 2019 s.d. 2021

Indikator Kinerja	Target			Realisasi (%)			% capaian		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset	-	96	88	-	100	90	-	104,17	102

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 102% (sangat baik). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, terdapat penurunan target indikator kinerja dari tahun sebelumnya (2020) yaitu dari 96 menjadi 88 pada tahun 2021 yang disebabkan kondisi Pandemi Covid-19 sehingga semua kegiatan pemerintahan terganggu, realisasi pencapaian juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 100% menjadi 90%, namun realisasi pencapaian target tahun 2021 sebesar 102% tetap dapat melebihi target, karena dengan realisasi sebesar 90% dari target yang ditetapkan sebesar 88%, realisasi ini masih dibawah realisasi pencapaian target tahun 2020 sebesar 104,17%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:



- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat yang sudah secara maksimal.
- Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Memberikan masukan dalam pelaksanaan inventarisasi aset, rekonsiliasi barang milik daerah.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pengawasan", dengan indikator kinerja :

1. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material, target kinerja 98%, realisasi 100%, capaian kinerja 102%
2. Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset dan target kinerja 88%, realisasi 90%, capaian kinerja 102%

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 telah melaksanakan 2 (dua) Program dengan 4 (empat) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp18.070.297.496,00 dan realisasi sebesar Rp17.479.494.684,00 (96,73%) seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
1	Penyelenggaraan Pengawasan anggaran	4.189.151.260	3.987.596.391	98,17	APBD
2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	821.261.735	788.052.565	96,86	APBD
Jumlah		5.010.412.995	4.775.648.956	97,52	

e. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tidak terdapat hambatan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran 2 pada indikator untuk mencapai sasaran 2 yaitu Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material dan Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan Aset, namun perlu beberapa catatan antara lain:

1. Respon auditan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu ditingkatkan.
2. Penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam bidang aset dan material untuk lebih patuh/taat pada peraturan perundang-undangan.

2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
----------------------------	----------------------------------------------------------------------

Pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ditetapkan Indikator Kinerja yaitu: "Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda dengan target nilai 7,90". Formulasi yang digunakan untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah adalah Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian PAN dan RB.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja internal perangkat daerah guna menunjang nilai evaluasi internal SAKIP Pemda. Seluruh OPD Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.

Dasar Perhitungan :

Realisasi = Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Nilai 7,9}} \times 100\%\end{aligned}$$

Capaian Sasaran 2 tahun 2021 dibandingkan dengan target disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	% Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda	7,9	-	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran adalah 7,9, namun Nilai SAKIP tahun 2020 belum didapatkan sehingga capaian belum dapat dihitung. Hal ini disebabkan nilai realisasi adalah dari Kemenpan RB dan sampai dengan penyusunan Renja 2023 ini belum didapatkan.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Sasaran 2 tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
tahun sebelumnya tahun 2019 s.d. 2021

Indikator kinerja	Target			Realisasi			% Capaian		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021

Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda	7,75	7,70	7,9	7,60	7,66	-	96,12	99,48	-
-------------------------------------	------	------	-----	------	------	---	-------	-------	---

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diketahui capaian indikator kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2019 dengan target 7,75 didapatkan realisasi nilai sebesar 7,60 dengan capaian 96,12, sedangkan pada tahun 2020 dengan target 7,70 didapatkan realisasi nilai sebesar 7,66 dengan capaian 99,48. Untuk tahun 2021, telah ditetapkan target sebesar 7,9, namun Nilai SAKIP tahun 2021 belum didapatkan sehingga capaian belum dapat dihitung.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja internal OPD secara berkala.
2. Tingginya tanggung jawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan, terutama dalam pendampingan SAKIP OPD.
3. Melakukan pendampingan lanjutan kepada OPD dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
4. Memberikan saran kepada masing-masing OPD dalam peningkatan nilai Evaluasi Internal SAKIP.
5. Tingginya tanggung jawab dan kesadaran masing-masing pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam menunjang capaian kinerja organisasi yang akan di evaluasi secara internal.
6. Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu "Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah”, dengan indikator kinerja :Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah dengan target 7,9, realisasi dan capaian belum dapat dinilai.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 telah melaksanakan 1 (satu) Program dengan 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp4.189.151.260,00 dan realisasi sebesar Rp 3.987.596.391,00 (98,17%) seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
1	Penyelenggaraan Pengawasan anggaran	4.189.151.260	3.987.596.391	98,17	APBD
JUMLAH		4.189.151.260	3.987.596.391	98,17	

e. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”, dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemerintah Daerah” tahun 2020 dengan target kinerja nilai 7,90, adalah:

1. Masih kurangnya pemahaman OPD tentang evaluasi capaian kinerja karena yang dilaksanakan baru sebatas evaluasi capaian anggaran dan program kegiatan.
2. Masih kurangnya penerapan evaluasi kinerja internal yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD baik dalam bentuk evaluasi Rencana Aksi maupun Evaluasi Kinerja.

3. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
----------------------------	--------------------------------------------

Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” dengan indikator kinerja yaitu “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja”.

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2021

Pada tahun 2021 target indikator kinerja “ Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” adalah dengan predikat A, setelah dilakukan evaluasi terhadap LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan hasilnya predikat A dengan capaian kinerja 100%.

Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2021 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Dasar Perhitungan :

Realisasi : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Predikat A}}{\text{Predikat A}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian Sasaran 3 tahun 2021 dibandingkan dengan target disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja Sasaran 3

No.	Sasaran	Indikator	Target (Peringkat)	Realisasi (Peringkat)	% Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	100

Realisasi predikat A yang tertera pada tabel di atas diperoleh setelah dilakukan evaluasi terhadap SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dengan capaian kinerja 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Capaian Sasaran 3 tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja
tahun sebelumnya tahun 2019 s.d. 2021

Indikator kinerja	Target			Realisasi			% capaian		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda	BB	A	A (81,09)	A	A	A (81,09)	>100	100	-

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, tahun 2020, dan 2021, tahun 2019 target kinerja Predikat BB dan realisasinya Predikat A sehingga capaiannya adalah >100 % (sangat baik), tahun 2020 target kinerja Predikat A dan realisasinya Predikat A sehingga capaiannya adalah 100% (sangat baik), sedangkan tahun 2021 target kinerja Predikat A (81,09) dan Realisasinya Predikat A (81,09) sehingga capaiannya adalah 100% (sangat baik).

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja

2. Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kerjanya yang benar sesuai dengan cascading.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi", dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, target kinerja A (81,09), realisasi A (81,09), capaian kinerja 100%

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 telah melaksanakan 1 (satu) Program dengan 7 (kegiatan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp 13.059.884.501,00 dan realisasi sebesar Rp12.703.845.728,00 (98,50%) seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 3

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.059.884.501	12.703.845.728	98,50	APBD
JUMLAH		13.059.884.501	12.703.845.728	98,50	

e. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 3 pada indikator untuk mencapai sasaran 3 yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi".



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektivitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan; serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

"MENJADI KONSULTAN DAN KATALISATOR TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI".

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Di mana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala untuk permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang

konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk mewujudkan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*costumer satisfaction*).

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan fungsional diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Di samping itu Inspektorat Jenderal harus mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dilihat dari Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, adanya hubungan keselarasan dari Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu "Menjadi Pengawas yang Profesional dan Bermartabat untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat".

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah "Membina dan Mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas provinsi".

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah Provinsi Sumbar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan SKPD sebagai berikut:

- a. Kegiatan Utama



- 1) Kegiatan Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 2) Kegiatan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 3) Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

b. Kegiatan Penunjang

Dalam melaksanakan kegiatan utama, dilakukan beberapa kegiatan penunjang antara lain:

- 1) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern.
- 2) Pembangunan Zona Integritas.
- 3) Pengendalian Gratifikasi.
- 4) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- 5) Penguatan Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP).
- 6) Rapat koordinasi pengawasan.
- 7) Fasilitas, sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
- 8) Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan.
- 9) Memberikan pelayanan (*Quality Assurance*) kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara sinergis serta arahan/bimbingan dan solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan.
- 10) Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategi di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Meskipun Pada Tahun 2021 tingkat capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebesar 100%, namun dalam pelaksanaan jadwal pemeriksaannya kadang

terjadi pergeseran jadwal/yang telah ditetapkan. Pergeseran jadwal disebabkan beberapa faktor antara lain terjadinya *overlapping* pemeriksaan dengan BPK, Itjen Kemendagri dan Itjen Kementerian lainnya, serta adanya refocusing dan pemotongan anggaran sehingga beberapa kegiatan pengawasan tidak terlaksana,

- 2) Masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat karena Laporan Hasil Pengawasan adalah sebagai salah satu input yang hasil pengawasan bagi auditan harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) pengawasan,
- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada umumnya berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009, namun masih perlu ditingkatkan.

Dalam upaya meningkatkan pengendalian risiko, maka pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 bertempat di Hotel Axana Kota Padang Inspektorat Provinsi mengadakan Sosialisasi Manajemen Risiko Sektor Pemerintah Daerah dengan mengundang Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan mengikut sertakan sejumlah 61 (enam puluh) OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

- 4) Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional serta Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah OPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kurangnya jumlah dan kualitas pengawasan sangat dirasakan pada saat tingginya frekuensi/jumlah pemeriksaan yang dilakukan baik pemeriksaan kasus/khusus (pengaduan masyarakat) maupun pemeriksaan reguler. Untuk itu aparat pengawas perlu diikutsertakan pelatihan, Diklat fungsional dan Diklat teknis lainnya

- 5) Upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sudah dilaksanakan secara maksimal namun masih perlu ditingkatkan lagi.
- 6) Masih perlu penambahan sarana dan prasarana yang representatif dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk menjalani tugas dan fungsi pengawasan.

2.3.2. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, di mana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah "Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamis Pada Tahun 2025" sedangkan visi Kepala Daerah terpilih Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".

Pencapaian visi Kepala Daerah dalam RPJM diwujudkan dalam 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Misi Ketujuh yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu:

- SUMBAR Sehat dan Cerdas
- SUMBAR Religius dan Berbudaya
- SUMBAR Sejahtera
- SUMBAR Berkeadilan

Untuk itu, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 2 (dua) program prioritas yaitu:

- Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai

Adapun faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah:

1. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan tenaga APIP yang profesional sehingga mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan
- b. Kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam mengimplementasi Sistem Pengendalian Internal
- c. Sistem Manajemen data dan informasi belum akurat dan terintegrasi

2. Faktor Pendorong

- a. Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya
- b. Respon positif *stakeholders* dalam meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan
- c. Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.
- d. Pemberdayaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil pengawasan dan hasil

pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan *Internal Control* bagi Pemerintahan Daerah.

2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan OPD Inspektorat Daerah Provinsi di atas, beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut:

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Objek Pemeriksaan yang belum kooperatif dan kurang respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
2. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 dan Pergub. nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat
3. Peningkatan kualitas aparat pengawasan yang profesional belum optimal
4. Sarana dan Prasarana belum representatif (antara lain Gedung kantor yang kurang memadai)

b. Peluang Pengembangan pelayanan

1. Adanya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.
3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

2.3.4. Formulasi Isu-Isu Penting

Salah satu dasar penyusunan Renja OPD adalah formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan. Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,

2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2021 = A), walaupun tantangan ke depan terhadap SAKIP Provinsi Sumbar harus ditingkatkan lagi untuk dapat mempertahankan dan atau meningkatkan nilai tersebut,
3. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum sepenuhnya memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan,
4. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP ke depan diperkirakan masih akan berjalan lamban walaupun di tahun 2021 menunjukkan progres yang menggembirakan,
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi),
6. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi,
7. Sesuai dengan hasil Forum Perangkat Daerah tanggal 24 Februari 2022 dengan peserta Inspektorat Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat serta beberapa OPD terkait, beberapa masukan antara lain:
 - a) Dalam evaluasi RAPBD Kabupaten Kota oleh Provinsi Sumatera Barat, anggaran Inspektorat Kabupaten Kota dapat diwajibkan sesuai dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah, karena selama ini Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan evaluasi tidak pernah menolak RAPBD Kabupaten Kota walaupun anggaran Inspektorat tidak sesuai dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah,
 - b) Dukungan untuk penyusunan Standar Khusus untuk biaya pengawasan, karena standar Biaya Pengawasan yang mengacu pada standar Perjalanan Dinas dalam Peraturan Presiden (Perpres.) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, tidak sesuai dengan risiko dan bentuk pekerjaan dari Inspektorat.

2.4.Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renja

Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Program/kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2022 disusun dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi antara Perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Sumatera Barat

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Rencana Kebutuhan (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	14.038.043	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	14.038.043	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	85 %	164.020	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	85 %	164.020	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	5 Dokumen	62.612	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	5 Dokumen	62.612	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen DPA Inspektorat yang disusun	4 Dokumen	7.171	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen DPA Inspektorat yang disusun	4 Dokumen	7.171	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan DPA Inspektorat yang disusun	2 Dokumen	39.455	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perubahan DPA Inspektorat yang disusun	2 Dokumen	39.455	

07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	8 Dokumen	54.782	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	8 Dokumen	54.782	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	11.565.853	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	11.565.853	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	110 Orang	11.316.110	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	110 Orang	11.316.110	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	11 Orang	196.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	11 Orang	196.800	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	121 Dokumen	10.757	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	121 Dokumen	10.757	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 Dokumen	11.213	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 Dokumen	11.213	

06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 Dokumen	30.974	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 Dokumen	30.974	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	50.235	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	50.235	
01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	8 unit	41.600	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	8 unit	41.600	
02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	2 Dokumen	8.635	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	2 Dokumen	8.635	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	404.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	404.100	
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	110 stel	82.500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	110 stel	82.500	
02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	80 orang	179.891	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	80 orang	179.891	

		Kelurahan					Kelurahan				
03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	8 Kali	25.641	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	8 Kali	25.641	
04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	5 kali	116.068	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	5 kali	116.068	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	900.371	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	900.371	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Inspektorat yang disediakan	113 Buah	5.650	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Inspektorat yang disediakan	113 Buah	5.650	
02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Logistik Kantor Inspektorat yang disediakan	1650 unit	157.117	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Logistik Kantor Inspektorat yang disediakan	1650 unit	157.117	
03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cetak Amplop Cetak Blangko SPPD, Kuitansi, Map SKPD Penggandaan	100 Kotak 3254 Buah 50312 Lembar	52.595	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cetak Amplop Cetak Blangko SPPD, Kuitansi, Map SKPD Penggandaan	100 Kotak 3254 Buah 50312 Lembar	52.595	

04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Langganan Surat Kabar Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	264 Eksemplar 6 Buah	32.640	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Langganan Surat Kabar Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	264 Eksemplar 6 Buah	32.640	
05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	25 Dokumen	652.369	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	25 Dokumen	652.369	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	15.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	15.000	
01	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Meja Kerja	1 unit	5.000	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Meja Kerja	1 unit	5.000	
02	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor Inspektorat yang dibangun	1 unit	5.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor Inspektorat yang dibangun	1 unit	5.000	
03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya AC	1 unit	5.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya AC	1 unit	5.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	731.275	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	731.275	

01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 surat	22.786	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 surat	22.786	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	1000 mbps 8 Rekening 3600 Meter Kubik 150000 KVA	32.423	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	1000 mbps 8 Rekening 3600 Meter Kubik 150000 KVA	32.423	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Tahun	3.697	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Tahun	3.697	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	15 orang	672.369	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	15 orang	672.369	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	207.190	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %	207.190	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	41.190	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	41.190	

		Kelurahan					Kelurahan				
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	7 unit	93.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	7 unit	93.400	
03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89 Unit	47.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89 Unit	47.200	
04	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/di rehab	12 Bulan	25.400	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/di rehab	12 Bulan	25.400	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	75 persen	3.677.873	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	75 persen	3.677.873	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	100 %	3.388.932	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	100 %	3.388.932	
01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Evaluasi yang diterbitkan Laporan Hasil Monitoring yang diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil reviu	103 LHE 2 Laporan 3 LHP 151 LHR	1.371.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Evaluasi yang diterbitkan Laporan Hasil Monitoring yang diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil reviu	103 LHE 2 Laporan 3 LHP 151 LHR	1.371.000	

02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Reviu yang diterbitkan Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	224 LHR 100 LHP	739.665	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Reviu yang diterbitkan Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	224 LHR 100 LHP	739.665	
03	Reviu Laporan Kinerja	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan	8 LHR	108.751	Reviu Laporan Kinerja	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan	8 LHR	108.751	
04	Reviu Laporan Keuangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan	51 LHR	165.260	Reviu Laporan Keuangan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu yang diterbitkan	51 LHR	165.260	
05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LHP yang diterbitkan	40 LHP	397.989	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LHP yang diterbitkan	40 LHP	397.989	
06	Kerja sama Pengawasan Internal	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Internal yang diterbitkan	19 LHE	106.267	Kerja sama Pengawasan Internal	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Internal yang diterbitkan	19 LHE	106.267	
07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase LHP yang ditindaklanjuti	70 %	500.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase LHP yang ditindaklanjuti	70 %	500.000	

	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditangani	100 %	288.942	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditangani	100 %	288.942	
01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	94.291	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	94.291	
02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kasus yang ditangani	100 %	194.651	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kasus yang ditangani	100 %	194.651	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	70 persen	951.557	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	70 persen	951.557	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang bisa dirumuskan	100 %	358.723	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Bisa dirumuskan	100 %	358.723	
01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dirumuskan	1 PKPT	311.721	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dirumuskan	1 PKPT	311.721	
02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	8 Peraturan	47.001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	8 Peraturan	47.001	

	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Asistensi dan Pendampingan yang Dilaksanakan	100 %	592.834	Pendampingan dan Asistensi		Persentase Asistensi dan Pendampingan yang Dilaksanakan	100 %	592.834	
01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan	1 Laporan	26.312	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang diterbitkan	1 Laporan	26.312	
02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterbitkan	1 Laporan	213.446	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterbitkan	1 Laporan	213.446	
03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterbitkan	1 Laporan	231.284	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterbitkan	1 Laporan	231.284	
04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penegakan integritas	3 Laporan	121.793	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penegakan integritas	3 Laporan	121.793	
					18.667.473					18.667.473	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai Program dan Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat

Inspektorat

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Nihil					

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Di samping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Di samping itu pula, sesuai dengan mandatnya Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup "*watchdog*" tetapi harus berperan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*). Sebagai *quality assurance*, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai *consulting* berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) atas permasalahan

yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat (Departemen/LPND), tingkat Provinsi dan sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam arah kebijakan bidang aparatur negara, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian

manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128). Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dan *Early Warning System*, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 2023

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.2.1. Tujuan



Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.

Tujuan dan sasaran kinerja merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tujuan : meningkatnya kualitas tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Indikator tujuan :

- Opini Laporan BPK
- Nilai Evaluasi SAKIP

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dicapai sesuai Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

a. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Indikator sasaran:

1. Tingkat Kapabilitas APIP
2. Tingkat Maturitas SPIP

b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Indikator sasaran:

Nilai Evaluasi Internal SAKIP Pemda

c. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Indikator sasaran:

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sasaran yang akan dicapai tahun 2023 sesuai Renstra Inspektorat Provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian internal pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera, Inspektorat bertanggungjawab terhadap Misi 7 yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Inspektorat telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang dapat dilihat dalam dokumen Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2023, Inspektorat Daerah didukung dengan Program/Kegiatan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Pagu Indikatif
INSPEKTORAT DAERAH		31,269,169,706
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.808.759.942
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.253.350
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.112.700
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	64.563.250
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	19.872.700

	Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.704.700
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.903.181.132
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.476.667.282
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	178.620.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	6.050.250
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	176.256.800
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	32.800.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	32.786.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	111.113.200
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	26.392.250
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.600.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	23.872.250
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.263.100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.985.600
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.204.534.250
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	165.000.000
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	26.383.750
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.718.350.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	234.328.500
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	60.472.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.550.530.125
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.481.800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	913.400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.124.300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.306.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.640.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.255.064.625
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.888.236.841
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	642.704.400
	Pengadaan Mebel	173.558.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	508.160.720
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya	538.499.721
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.314.000

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.411.527.544
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.365.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.924.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	4.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	970.738.544
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.383.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.800.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.973.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.450.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	317.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.160.000
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.327.208.314
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.859.273.214
	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	3.309.105.564
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.383.626.500
	Reviu Laporan Kinerja	42.150.500
	Reviu Laporan Keuangan	277.410.600
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	750.876.250
	Kerja sama Pengawasan Internal	468.626.800
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	627.477.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	467.935.100
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	143.461.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	324.474.100
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.133.201.450
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	234.227.800
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	32.185.400
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	202.042.400
2	Pendampingan dan Asistensi	1.898.973.650
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	314.308.450
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	208.805.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.074.640.200

	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	301.220.000
--	-------------------------------------------------------------	-------------

Sumber Data: SIPD

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renja PD menjadi suatu instrumen dan indikator yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana kerja dan pendanaan memuat Program, Kegiatan, Indikator, Lokasi, Kebutuhan dana tahun berjalan dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut:

TABEL T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

NAMA OPD : INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Target	Hasil Kegiatan						
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
		INSPEKTORAT DAERAH						31.269.169.706						41.413.121.419
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						21.808.759.942						27.528.733.813	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						235.253.350						278.315.440
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		100 %	7 dokumen	85 %	79.112.700	DAU- PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	97.798.690

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		100 %	Dokumen dokumen 4 dokumen	85 %	64.563.250	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	103.434.910
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		100 %	3 dokumen	85 %	19.872.700	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	35.769.690
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		100 %	5 dokumen	85 %	71.704.700	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	41.312.150
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12.903.181.132				12.993.064.663
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100 %	110 orang	100 %	12.476.667.282	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	12.580.129.183
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100 %	8 orang	100 %	178.620.000	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	196.482.000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100 %	67 dokumen	100 %	6.050.250	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	6.700.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100 %	1 dokumen	100 %	176.256.800	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	162.202.480
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100 %	1 dokumen	100 %	32.800.800	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	10.051.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester yang disiapkan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100 %	13 dokumen	100 %	32.786.000	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	37.500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								111.113.200				122,204,610
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	4 dokumen	100 %	26.392.250	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	29.392.250
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan	Jumlah BMD yang diasuransikan	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	9 unit/set	100 %	48.600.000	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan	100 %	53.600.000

		daerah provinsi										pemerintahan daerah provinsi		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honoranya	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	1 dokumen 3 orang	100 %	23.872.250	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	25.897.200
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	1 dokumen	100 %	9.263.100	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	10.021.100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100 %	1 dokumen	100 %	2.985.600	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3.294.060
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								3.204.534.250					2,669,169,800
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	120 orang	100 %	165.000.000	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	190.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	2 Dokumen 100 Dokumen	100 %	26.383.750	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	27.269.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	610 orang 120 orang	100 %	2.718.350.000	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1.998.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	48 orang 8 kali	100 %	234.328.500	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	405.000.800
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	20 kali	100 %	60.472.000	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	48.900.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.550.530.125				2,142,914,800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	117 unit/set	100 %	6.481.800	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	8.907.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	30 unit/set	100 %	913.400	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	18.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	2790 unit/set	100 %	170.124.300	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan	100 %	336.439.000

											daerah provinsi		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	40 kali	100 %	85.306.000	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	89.768.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	246 unit/set	100 %	32.640.000	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	38.900.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	81 dokumen	100 %	1.255.064.625	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1.650.900.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.888.236.841					7,217,800,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 %	2 unit	100 %	642.704.400	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	1.300.000.000
Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah mebel	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 %	14 unit/set	100 %	173.558.000	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	98.000.000

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	41 unit/set	100 %	508.160.720	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	650.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah gedung kantor inspektorat yang dibangun	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	1 unit	100 %	538.499.721	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	5.079.800.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	3 unit/set	100 %	25.314.000	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.411.527.544				1,681,944,500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	500 surat	100 %	24.365.000	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	30.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan jumlah rekening tagihan telepon/fax. yang dibayarkan jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 mbps 2 rekening 1740 meter kubik 144000 KVA	100 %	411.924.000	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	650.544.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (spanduk)	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5 unit	100 %	4.500.000	DAU-PAD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	3.400.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah tenaga pelayanan umum	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	79 orang	100 %	970.738.544	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	998.000.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								504.383.500					423.320.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100 %	1 unit	100 %	21.800.000	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	26.900.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100 %	9 unit	100 %	89.973.500	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	90.800.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100 %	33 unit/set	100 %	51.450.000	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	40.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah gedung kantor Inspektorat yang dipelihara/rehab	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100 %	1 unit	100 %	317.000.000	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	240.800.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/di rehab	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100 %	2 uni	100 %	24.160.000	DAU-PAD		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	24.220.000

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								7.327.208.314				11,268,951,106
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								6.859.273.214				11,015,019,506
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah jumlah laporan pengawasan kinerja pemerintah daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan		78 %	0 Laporan 778 laporan	100 %	3.309.105.564	DAU-PAD	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	5.793.779.406
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	jumlah hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan		78 %	307 laporan	100 %	1.383.626.500	DAU-PAD	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	1.521.928.000
	Reviu Laporan Kinerja	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	jumlah laporan kinerja yang direviu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan		78 %	52 laporan	100 %	42.150.500	DAU-PAD	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	43.455.000
	Reviu Laporan Keuangan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	jumlah laporan keuangan yang direviu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan		78 %	52 laporan	100 %	277.410.600	DAU-PAD	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	312.575.200
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	jumlah hasil pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan		78 %	8 laporan	100 %	750.876.250	DAU-PAD	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	875.786.900
	Kerja sama Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	jumlah hasil pengawasan internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan		78 %	15 laporan	100 %	468.626.800	DAU-PAD	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang	78 %	1.556.980.000

												ditindaklanjuti		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Dilaksanakan		78 %	3 laporan	100 %	627.477.000	DAU-PAD		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	910.515.000
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								467.935.100					253.931.600
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	persentase penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah yang diproses/ditindaklanjuti	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditangani		78 %	60 %	80 %	143.461.000	DAU-PAD		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	198.886.000
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	persentase pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang ditangani		78 %	100 %	80 %	324.474.100	DAU-PAD		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	78 %	55.045.600
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								2.133.201.450					2.615.436.500
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								234.227.800					917.895.500
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	Jumlah kebijakan teknis yang ditetapkan	Persentase Kebijakan Teknis yang ditetapkan		75 %	8 dokumen	100 %	32.185.400	DAU-PAD		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	75 %	50.005.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	Jumlah kegiatan teknis yang ditetapkan	Persentase Kebijakan Teknis yang ditetapkan		75 %	1 dokumen	100 %	202.042.400	DAU-PAD		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	75 %	867.890.500

Pendampingan dan Asistensi								1.898.973.650					1.697.541.000
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	Jumlah laporan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan		75 %	1 laporan 0 Perangkat Daerah	100 %	314.308.450	DAU-PAD		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	75 %	51.556.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	Jumlah Laporan Kegiatan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan		75 %	1 laporan	100 %	208.805.000	DAU-PAD		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	75 %	231.428.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	Jumlah laporan penegakan integritas	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan		75 %	1 laporan	100 %	1.074.640.200	DAU-PAD		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	75 %	994.057.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	Jumlah laporan kegiatan penegakan integritas	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan		75 %	2 laporan	100 %	301.220.000	DAU-PAD		Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai	75 %	420.500.000
TOTAL								31.269.169.706					41.413.121.419

5.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun.

Renja PD juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra PD) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi.

Selain itu, dengan berakhirnya periode Renstra 2016-2021 dan terbitnya Renstra 2021-2026, maka terdapat beberapa perubahan fokus dari pimpinan daerah sehingga terdapat beberapa perubahan sasaran strategis beserta indikator terkait sasaran strategis tersebut sehingga terdapat beberapa ketidak sinambungan pencapaian indikator.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.
2. Pemeriksaan reguler/kinerja, reviu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja.
3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap Perangkat Daerah.
3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui Diklat, Bimtek dan sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan.

Padang, 30 Juni 2022

